

PROFIL ASN KABUPATEN BATANG

PERIODE APRIL 2024

REGISTER BPS : K-22.3325.001



JUMLAH ASN BERDASARKAN :

- 1. PANGKAT DAN GOLONGAN**
- 2. ESELON JABATAN**
- 3. TINGKAT PENDIDIKAN**
- 4. JENIS KELAMIN**
- 5. AGAMA**
- 6. USIA**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BATANG
BIDANG MUTASI DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk menyusun PROFIL ASN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG PERIODE APRIL 2024 ini. Profil ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sehingga diharapkan dapat mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Batang yaitu **Tujuan ke-2 : Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel**, dengan **Sasaran “Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah” dan “Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang cerdas, cepat dan responsif (agile governance)”**.

PROFIL ASN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG PERIODE APRIL 2024 ini disusun sebagai salah satu penyedia informasi tentang Potensi Sumber Daya Aparatur di Kabupaten Batang

Semoga PROFIL ASN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG PERIODE APRIL 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, maupun pihak lain yang membutuhkan informasi tentang Potensi Sumber Daya Aparatur di Kabupaten Batang

Batang, 30 April 2024
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
KABUPATEN BATANG

DWI RIYANTO, AP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197607101996021004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	III
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
1.4 PENGERTIAN.....	4
1.5 METODE PENYUSUNAN DATA.....	4
1. PENGUMPULAN DATA.....	4
2. PENYAJIAN DATA.....	4
BAB II HASIL PENGOLAHAN DATA PEGAWAI.....	5
TABEL 2.1 ASN BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN.....	7
TABEL 2.2 ASN BERDASARKAN ESELON JABATAN.....	7
TABEL 2.3 ASN BERDASARKAN PENDIDIKAN.....	8
TABEL 2.4 ASN BERDASARKAN JENIS KELAMIN.....	8
TABEL 2.5 ASN MENURUT AGAMA.....	10
TABEL 2.6 ASN BERDASARKAN JUMLAH JABATAN YANG TERSEDIA DAN TERISI.....	12
TABEL 2.7 ASN FUNGSIONAL PENDIDIKAN.....	12
TABEL 2.8 ASN MENURUT FUNGSIONAL KESEHATAN.....	13
TABEL 2.9 ASN FUNGSIONAL LAINNYA.....	16
TABEL 2.10 ASN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA).....	22
TABEL 2.11 ASN BERDASARKAN GOLONGAN PER-OPD.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi saat ini sangatlah pesat, sehingga pengaruhnya pada kinerja dan tingkat kehidupan manusia seiring dengan perkembangan global. Era Teknologi Informasi (TI) dimana semua hal ikhwal dapat dijelajahi, ditelusuri bahkan tidak ada lagi hal yang tersembunyi. Penggunaan Teknologi Informasi dapat menunjang kegiatan kerja atau mempermudah penyelesaian tugas- tugas di bidang pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, selain itu efisiensi dan efektivitas di dalam pelaksanaan tugas kedinasan juga akan meningkat. Oleh karena itu penggunaan teknologi Informasi mutlak diperlukan dalam membantu menyelesaikan pekerjaan, sehingga penyelesaian pekerjaan menjadi lebih efektif.

Setiap pengelola manajemen kepegawaian dituntut untuk bekerja keras meningkatkan mutu dan keakuratan dalam menyajikan data kepegawaian di era yang semakin kompetitif ini. Database yang semakin variatif diperlukan untuk dapat memberikan informasi yang luas bagi pimpinan, sehingga data yang disajikan sangatlah penting untuk menentukan dan mengambil suatu kebijakan atau keputusan yang strategis secara cepat dan tepat.

Badan Kepegawaian Daerah Batang sebagai perangkat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah salah satu fungsinya yaitu pelaksanaan teknis dan administratif di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dimana diantaranya mencakup pengelolaan data kepegawaian yang disajikan dalam bentuk

aneka informasi Statistik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa informasi data kepegawaian yang telah disusun sering dimanfaatkan oleh unit kerja, lembaga-lembaga di luar kepegawaian. Kenyataan ini melahirkan pemikiran perlunya data kepegawaian Aparatur Sipil Negara dibuat dalam bentuk Profil Laporan, sehingga keperluan informasi data kepegawaian dapat ditangani dengan lebih tepat, cepat dan akurat dalam kualitas sajian yang menarik.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Profil ASN Kabupaten Batang Bulan April 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

- Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- d. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 - e. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
 - f. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 13);
 - g. Peraturan Bupati Batang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Batang tahun 2021 Nomor 115);

1.3. Maksud dan Tujuan

Profil ASN Pemerintah Kabupaten Batang Bulan April 2024 mengandung maksud dan tujuan:

1. Mengkompilasi data kepegawaian yang ada di 44 (empat puluh empat) perangkat daerah sehingga menjadi satu kesatuan data informasi.
2. Menyajikan informasi data kepegawaian, sehingga dapat diperoleh gambaran/keadaan umum kepegawaian khususnya Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Batang.
3. Menyajikan informasi data kepegawaian, sebagai bahan guna memenuhi kebutuhan unsur pimpinan dalam rangka perencanaan, pembinaan pegawai serta kebutuhan lainnya.
4. Secara bertahap dan berjangka panjang menyiapkan data

dasar yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kebijakan kepegawaian di Pemerintah Kabupaten Batang .

1.4 Pengertian

Beberapa pengertian yang berkaitan dengan Profil ASN Kabupaten Batang sebagai berikut :

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
4. Eselon adalah sebuah tingkatan jabatan yang struktural dalam dunia kerja pemerintahan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

1.5 Metode Penyusunan Data

Penyusunan PROFIL ASN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG PERIODE April 2024 disusun dengan langkah- langkah dan cara sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data kepegawaian dilakukan dengan melakukan peremajaan secara rutin data Sistem Informasi Kepegawaian yang dilakukan oleh Admin OPD dan diolah oleh tim pengelola

database kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang dan proses sinkronisasi data / verifikasi dan validasi data kepegawaian. Data kepegawaian yang terkumpul merupakan data akhir dan terbaru, dengan maksud guna memperoleh data yang sesuai dengan peraturan perundangan, tepat, akurat dan akuntabel.

2. Penyajian Data

Data kepegawaian hasil update dari masing-masing instansi pemerintah di lingkungan Kabupaten Batang merupakan data kuantitatif, selanjutnya dihimpun dan dikelompokkan dalam bentuk tabel, untuk selanjutnya dianalisa lalu diambil konklusi sesuai kebutuhan.

BAB III
HASIL PENGOLAHAN DATA PEGAWAI

Berdasarkan hasil pengolahan data kepegawaian sampai dengan 30 April 2024 diperoleh data kepegawaian yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

6. Jumlah ASN berdasarkan Pangkat dan Golongan
7. Jumlah ASN berdasarkan Eselon Jabatan
8. Jumlah ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan
9. Jumlah ASN berdasarkan Jenis Kelamin
10. Jumlah ASN berdasarkan Agama
11. Jumlah ASN berdasarkan Kelompok Jabatan Struktural
12. Jumlah ASN berdasarkan Kelompok Jabatan Fungsional
13. Jumlah ASN berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah

Jumlah ASN Kabupaten Batang keadaan Bulan **April 2024** **adalah 6.498** ASN terinci sebagai berikut :

TABEL 2.1 ASN BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN

Golongan	Pangkat	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
I/c	Juru	5	1	6
I/d	Juru Tingkat I	48	5	53
II/a	Pengatur Muda	65	4	69
II/b	Pengatur Muda Tingkat I	58	5	63
II/c	Pengatur	198	146	344
II/d	Pengatur Tingkat I	181	39	220
III/a	Penata Muda	735	1428	2163
III/b	Penata Muda Tingkat I	351	474	825
III/c	Penata	228	474	702
III/d	Penata Tingkat I	339	604	943
IV/a	Pembina	318	392	710
IV/b	Pembina Tingkat I	157	181	338
IV/c	Pembina Utama Muda	46	16	62
	Jumlah	2729	3769	6498

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah ASN terbanyak adalah ASN Golongan III (4633 ASN) , diikuti ASN Golongan IV (1110 ASN), ASN Golongan II (696 ASN) dan jumlah ASN terendah adalah ASN Golongan I (59 ASN).

TABEL 2.2 ASN BERDASARKAN ESELON JABATAN

Jenis Jabatan	Eselon	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Total (orang)
Jabatan Fungsional Tertentu	NON	1381	2544	3925
Jabatan Pelaksana	NON	1103	1088	2191
Jabatan Struktural	II.b	24	1	25
Jabatan Struktural	III.a	39	5	44
Jabatan Struktural	III.b	56	34	90
Jabatan Struktural	IV.a	93	68	161
Jabatan Struktural	IV.b	33	29	62
Jumlah		2729	3769	6498

Dari Tabel 2.2 di atas terlihat bahwa jumlah Eselon ASN terbanyak adalah Eselon IV (223 ASN), diikuti ASN Eselon III (134 ASN), ASN Eselon II (25 ASN).

TABEL 2.3 ASN BERDASARKAN PENDIDIKAN

Pendidikan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
S-3	3	0	3
S-2	188	160	348
S-1	1675	2678	4353
Diploma IV	20	77	97
Diploma III	176	690	866
Diploma II	43	22	65
Diploma I	1	4	5
SLTA	483	122	605
SLTP	98	8	106
Sekolah Dasar	42	8	50
Jumlah	2729	3769	6498

Dari Tabel 2.3 jumlah ASN didominasi oleh tingkat pendidikan S-1 (4353 ASN), diikuti oleh tingkat pendidikan D.III (866 ASN) dan paling sedikit adalah tingkat pendidikan S-3 (3 ASN)

TABEL 2.4 ASN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

No	UNOR	Perempuan (orang)	Laki-laki (orang)	Jumlah (orang)
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	14	13	27
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8	10	18
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	30	38	68
4	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	9	16	25
5	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	19	40	59
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12	26	38
7	DINAS KESEHATAN	650	161	811
8	DINAS KETENAGA KERJAAN	13	6	19
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11	18	29
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	11	41	52
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	50	78	128
12	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	12	19	31
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16	113	129
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11	11	22
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12	12	24

16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9	11	20
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2399	1492	3891
18	DINAS PERHUBUNGAN	4	40	44
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	11	55	66
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	17	15	32
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	12	21	33
22	DINAS SOSIAL	8	12	20
23	INSPEKTORAT DAERAH	24	18	42
24	KECAMATAN BANDAR	4	13	17
25	KECAMATAN BANYUPUTIH	3	8	11
26	KECAMATAN BATANG	24	45	69
27	KECAMATAN BAWANG	4	8	12
28	KECAMATAN BLADO	5	3	8
29	KECAMATAN GRINGSING	2	7	9
30	KECAMATAN KANDEMAN	1	8	9
31	KECAMATAN LIMPUNG	4	6	10
32	KECAMATAN PECALUNGAN	0	9	9
33	KECAMATAN REBAN	1	16	17
34	KECAMATAN SUBAH	2	9	11
35	KECAMATAN TERSONO	2	9	11
36	KECAMATAN TULIS	2	10	12
37	KECAMATAN WARUNGASEM	4	7	11
38	KECAMATAN WONOTUNGGAL	5	8	13
39	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	9	17	26
40	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. BATANG	217	114	331
41	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG	74	29	103
42	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6	49	55
43	SEKRETARIAT DAERAH	33	66	99
44	SEKRETARIAT DPRD	5	22	27
	Jumlah	3769	2729	6498

Dari Tabel 2.4 jumlah ASN dengan jenis kelamin perempuan menjadi yang terbanyak 3.769 ASN sedangkan ASN dengan jenis kelamin laki-laki 2.729 ASN, selisih 1.040 ASN.

TABEL 2.5 ASN MENURUT AGAMA

N o	UNOR	Islam (orang)	Katolik (orang)	Kristen (orang)	Hindu (orang)	Budha (orang)	Konghucu (orang)	Jumlah (orang)
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	26	0	1	0	0	0	27
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	18	0	0	0	0	0	18
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	66	1	1	0	0	0	68
4	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	25	0	0	0	0	0	25
5	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	59	0	0	0	0	0	59
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	37	0	1	0	0	0	38
7	DINAS KESEHATAN	800	2	8	0	1	0	811
8	DINAS KETENAGA KERJAAN	19	0	0	0	0	0	19
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	29	0	0	0	0	0	29
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	51	0	1	0	0	0	52
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	127	0	1	0	0	0	128
12	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	31	0	0	0	0	0	31
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	129	0	0	0	0	0	129
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	22	0	0	0	0	0	22
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	24	0	0	0	0	0	24
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	18	2	0	0	0	0	20
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3847	13	31	0	0	0	3891
18	DINAS PERHUBUNGAN	42	1	1	0	0	0	44
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	66	0	0	0	0	0	66
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	32	0	0	0	0	0	32
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	32	0	1	0	0	0	33
22	DINAS SOSIAL	20	0	0	0	0	0	20

23	INSPEKTORAT DAERAH	42	0	0	0	0	0	42
24	KECAMATAN BANDAR	17	0	0	0	0	0	17
25	KECAMATAN BANYUPUTIH	11	0	0	0	0	0	11
26	KECAMATAN BATANG	69	0	0	0	0	0	69
27	KECAMATAN BAWANG	12	0	0	0	0	0	12
28	KECAMATAN BLADO	8	0	0	0	0	0	8
29	KECAMATAN GRINGSING	9	0	0	0	0	0	9
30	KECAMATAN KANDEMAN	9	0	0	0	0	0	9
31	KECAMATAN LIMPUNG	10	0	0	0	0	0	10
32	KECAMATAN PECALUNGAN	8	0	1	0	0	0	9
33	KECAMATAN REBAN	17	0	0	0	0	0	17
34	KECAMATAN SUBAH	11	0	0	0	0	0	11
35	KECAMATAN TERSONO	11	0	0	0	0	0	11
36	KECAMATAN TULIS	12	0	0	0	0	0	12
37	KECAMATAN WARUNGASEM	11	0	0	0	0	0	11
38	KECAMATAN WONOTUNGGAL	13	0	0	0	0	0	13
39	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	25	0	1	0	0	0	26
40	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. BATANG	326	2	2	0	1	0	331
41	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG	103	0	0	0	0	0	103
42	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	54	1	0	0	0	0	55
43	SEKRETARIAT DAERAH	99	0	0	0	0	0	99
44	SEKRETARIAT DPRD	27	0	0	0	0	0	27
	JUMLAH	6424	22	50	0	2	0	6498

Dari Tabel 2.5 terlihat jumlah ASN dengan agama mayoritas adalah Islam sebanyak 99% (6424 ASN) dari seluruh ASN sisanya dibagi oleh Kristen (50 ASN), Katholik (22 ASN), Budha (2 ASN), Hindu (0 ASN), dan Konghuchu (0 ASN).

TABEL 2.6 ASN BERDASARKAN JUMLAH JABATAN YANG TERSEDIA DAN TERISI

Eselon	Tersedia (orang)	Terisi (orang)	Kosong (orang)
2.a	1	0	1
2.b	32	25	7
3.a	56	44	12
3.b	105	90	15
4.a	190	161	29
4.b	76	62	14
TOTAL	460	382	78

Dari Tabel 2.6 terlihat jumlah jabatan yang paling banyak kekosongan adalah Eselon IV/a (29 jabatan), hanya terisi 161 dari 190 jabatan yang tersedia.

TABEL 2.7 ASN FUNGSIONAL PENDIDIKAN

No.	Jabatan Fungsional Tertentu	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1	AHLI PERTAMA - GURU IPA	0	1	1
2	Guru	4	3	7
3	GURU BAHASA INDONESIA AHLI PERTAMA	1	0	1
4	GURU BAHASA INGGRIS AHLI PERTAMA	1	2	3
5	GURU BIMBINGAN KONSELING AHLI PERTAMA	1	7	8
6	GURU IPA AHLI PERTAMA	0	2	2
7	GURU KELAS AHLI PERTAMA	48	130	178
8	GURU KELAS AHLI PERTAMA (X)	1	0	1
9	Guru Madya	310	429	739
10	GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA	1	3	4
11	Guru Muda	283	560	843
12	Guru Pembina	0	1	1
13	GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA	31	48	79
14	GURU PENJAS AHLI PERTAMA	2	1	3
15	GURU PENJASORKES AHLI PERTAMA	11	2	13
16	Guru Pertama	199	303	502
17	GURU PPKN AHLI PERTAMA	1	2	3
18	PAMONG BELAJAR AHLI PERTAMA	0	1	1
19	Pamong Belajar Madya	2	0	2
20	Pamong Belajar Pertama	0	1	1
21	PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA	1	0	1
22	Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) SMP Madya	0	1	1
23	PENGAWAS SEKOLAH AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KURIKULUM DAN PENILAIAN SMP	1	0	1

24	PENGAWAS SEKOLAH AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KURIKULUM, PENILAIAN, PENGEMBANGAN PESERTA DIDIK DAN PEM	1	0	1
25	Pengawas Sekolah Madya	31	11	42
26	Pengawas Sekolah Madya - TK/SD	0	1	1
27	Pengawas Sekolah Muda	1	5	6
28	Penilik Madya	4	0	4
29	Penilik Muda	2	1	3
	Jumlah	937	1515	2452

Dari Tabel 2.7 diatas jumlah fungsional Pendidikan terbanyak diisi oleh jabatan Guru (2388 ASN) dari 2452 ASN fungsional pendidikan, sisanya diisi Pengawas (52 ASN), Penilik (7 ASN) dan Pamong belajar (5 ASN).

TABEL 2.8 ASN MENURUT FUNGSIONAL KESEHATAN

No.	Jabatan Fungsional Tertentu	Laki_laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1	Administrator Kesehatan Ahli Pertama / Pertama	0	1	1
2	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	0	1
3	Apoteker Ahli Madya / Madya	1	3	4
4	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	1	2
5	Apoteker Ahli Pertama / Pertama BLUD	0	4	4
6	Asisten Apoteker Mahir / Pelaksana Lanjutan	0	6	6
7	Asisten Apoteker Mahir / Pelaksana Lanjutan Non BLUD	1	1	2
8	Asisten Apoteker Penyelia	1	14	15
9	Asisten Apoteker Penyelia Non BLUD	0	1	1
10	Asisten Apoteker Terampil / Pelaksana	0	4	4
11	Bidan Ahli Madya / Madya	0	17	17
12	Bidan Ahli Muda / Muda	0	40	40
13	Bidan Ahli Pertama / Pertama	0	22	22
14	Bidan Mahir / Lanjutan	0	96	96
15	Bidan Pelaksana Lanjutan	0	114	114
16	Bidan Penyelia	0	88	88
17	BIDAN TERAMPIL	0	3	3
18	Bidan Terampil / Pelaksana	0	36	36
19	Dokter Ahli Madya / Madya	22	27	49
20	Dokter Ahli Muda / Muda	0	3	3
21	DOKTER AHLI PERTAMA	1	1	2
22	Dokter Ahli Pertama / Pertama	7	7	14
23	Dokter Gigi Ahli Madya / Madya	1	4	5

24	Dokter Gigi Ahli Pertama	0	8	8
25	DOKTER SPESIALIS ANAK AHLI PERTAMA	1	0	1
26	DOKTER SPESIALIS BEDAH AHLI PERTAMA	1	0	1
27	DOKTER SPESIALIS MATA AHLI PERTAMA	0	1	1
28	ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	0	2	2
29	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda / Muda	2	0	2
30	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama / Pertama	1	2	3
31	Fisioterapis Ahli Pertama / Pertama	0	1	1
32	Fisioterapis Mahir / Lanjutan	1	0	1
33	Fisioterapis Penyelia	1	0	1
34	Nutrisionis Ahli Madya / Madya NON BLUD	0	1	1
35	Nutrisionis Ahli Muda / Muda	0	6	6
36	Nutrisionis Ahli Pertama / Pertama	1	0	1
37	Nutrisionis Ahli Pertama / Pertama BLUD	0	1	1
38	Nutrisionis Mahir / Lanjutan	0	1	1
39	Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	0	2	2
40	Nutrisionis Penyelia	0	9	9
41	Okupasi Terapis Terampil / Pelaksana	0	1	1
42	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama / Kerja Pertama	0	1	1
43	Penata Anestesi Ahli Madya	1	1	2
44	Penata Anestesi Ahli Muda	2	0	2
45	Penata Anestesi Ahli Pertama	1	3	4
46	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya / Masyarakat Madya	1	0	1
47	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI MADYA NON BLUD	1	0	1
48	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda / Masyarakat Muda	2	0	2
49	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA - NON BLUD	0	1	1
50	Perawat Ahli Madya	8	21	29
51	Perawat Ahli Muda	13	18	31
52	Perawat Ahli Pertama	15	6	21
53	Perawat Gigi Ahli Muda	0	1	1
54	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	1	2	3
55	Perawat Gigi Penyelia	1	16	17
56	Perawat Gigi Terampil	1	5	6
57	Perawat Madya	4	9	13
58	Perawat Mahir	1	5	6
59	Perawat Muda	4	10	14
60	Perawat Pelaksana	2	0	2

61	Perawat Pelaksana Lanjutan	4	15	19
62	Perawat Penyelia	63	143	206
63	Perawat Pertama	1	1	2
64	PERAWAT TERAMPIL	1	4	5
65	Perekam Medis Pelaksana	5	6	11
66	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	1	0	1
67	Perekam Medis Penyelia	1	5	6
68	Perekam Medis Penyelia NON BLUD	1	0	1
69	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya / Kesehatan Madya	1	0	1
70	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda / Kesehatan Muda	0	2	2
71	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama / Kesehatan Pertama	0	1	1
72	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	1	1	2
73	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	1	6	7
74	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia BLUD	0	1	1
75	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil / Kesehatan Pelaksana	6	8	14
76	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil / Kesehatan Pelaksana Non BLUD	3	1	4
77	Radiografer Pelaksana	0	2	2
78	Radiografer Penyelia	3	3	6
79	Refraksionis Optisien Penyelia	0	1	1
80	Refraksionis Optisien Terampil / Pelaksana	0	2	2
81	Sanitarian Ahli Madya / Madya	0	2	2
82	Sanitarian Ahli Pertama / Pertama	1	1	2
83	Sanitarian Penyelia	2	4	6
84	TEKNIK ELEKTROMEDIS TERAMPIL	1	0	1
85	Teknisi Elektromedis Ahli Muda / Muda	0	1	1
86	Teknisi Elektromedis Pelaksana	3	0	3
87	Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	0	1	1
88	Teknisi Gigi Terampil / Pelaksana	2	0	2
89	Teknisi Transfusi Darah Terampil / Pelaksana	1	1	2
90	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	0	1	1
91	TERAPIS WICARA TERAMPIL	1	0	1
	Jumlah	205	840	1045

Dari Tabel 2.8 dapat dilihat jumlah fungsional Kesehatan terbanyak diisi oleh jabatan Bidan (416 ASN) dari 1045 ASN.

TABEL 2.9 ASN FUNGSIONAL LAINNYA

No.	Jabatan Fungsional Tertentu	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MAN	1	0	1
2	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR DATA, INFORMASI DAN KERJASAM	0	1	1
3	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	1	0	1
4	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PROMOSI PARIWISATA	1	0	1
5	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF MUDA (PB)	0	1	1
6	ANALIS AKUAKULTUR AHLI MUDA (PB)	0	1	1
7	ANALIS HUKUM AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR DOKUMENTASI DAN INFORMASI	0	1	1
8	ANALIS HUKUM MUDA (PB)	0	1	1
9	Analisis Kebakaran Ahli Pertama	0	1	1
10	ANALIS KEBENCANAAN MUDA (PB)	2	0	2
11	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (PB)	0	1	1
12	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	1	0	1
13	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR ASPIRASI DAN DOKUMENTASI	1	0	1
14	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR EVALUASI DAN PELAPORAN	1	0	1
15	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR FASILITAS PENGANGGARAN	1	0	1
16	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR FASILITAS PENGAWASAN	1	0	1
17	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	0	1	1
18	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KESEJAHTERAAN SOSIAL	0	1	1
19	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	0	1	1
20	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	1	0	1
21	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENYUSUN PROGRAM	1	0	1
22	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PB	1	1	2
23	ANALIS KEBIJAKAN MUDA (PB)	5	4	9
24	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN	0	1	1
25	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	0	1	1

26	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KONSUMSI, PENGANEKARAGAMAN DAN KEAMANAN PANGAN	1	0	1
27	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	0	3	3
28	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	2	2	4
29	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA (PB)	2	4	6
30	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama	0	1	1
31	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PASCA PANEN DAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA	0	1	1
32	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PASCA PANEN DAN AGRIBISNIS PERKEBUNAN	1	0	1
33	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PASCA PANEN DAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN	0	1	1
34	Analisis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana	0	1	1
35	Analisis Pasar Hasil Pertanian Pertama	1	0	1
36	ANALIS PEMANFAATAN IPTEK AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENELITIAN	0	1	1
37	ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN PASAR	1	0	1
38	ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	0	1	1
39	ANALIS PERDAGANGAN MUDA (PB)	2	0	2
40	ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN AHLI MUDA	1	0	1
41	analisis prasarana dan sarana pertanian ahli muda (pb)	1	0	1
42	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA	0	1	1
43	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA (PB)	1	6	7
44	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	1	2	3
45	ARSIPARIS AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN	1	0	1
46	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	0	2	2
47	Arsiparis Mahir	0	1	1
48	ARSIPARIS MUDA (PB)	0	1	1
49	Arsiparis Pelaksana	0	2	2
50	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	1	0	1
51	Arsiparis Penyelia	2	0	2
52	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	0	1	1
53	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula	5	0	5
54	AUDITOR AHLI PERTAMA	2	4	6
55	Auditor Madya	2	1	3
56	Auditor Muda	3	7	10
57	INSTRUKTUR AHLI PERTAMA	2	0	2
58	Instruktur Muda	0	1	1

59	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	0	1	1
60	Mediator Hubungan Industrial Pertama	1	0	1
61	Medik Veteriner Muda (PB)	0	1	1
62	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Operator Siak) Terampil	9	6	15
63	PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA (PB)	1	0	1
64	PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	0	1	1
65	PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1	0	1
66	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	1	0	1
67	PELATIH OLAHRAGA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBINAAN OLAHRAGA	0	1	1
68	Pemadam Kebakaran Terampil	4	0	4
69	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA (PB)	1	1	2
70	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBINAAN DAN PELAYANAN KELUAR	1	0	1
71	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGGERAKAN INSTITUSI DAN PERA	1	0	1
72	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENYULUH DAN PENGGERAKAN	0	1	1
73	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA MUDA (PB)	0	1	1
74	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KEDARURATAN DAN LOGISTIK	0	1	1
75	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA MUDA (PB)	1	1	2
76	Penata Perizinan Ahli MUDA	1	2	3
77	PENATA RUANG AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI PENATAAN RUANG	1	0	1
78	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	1	1	2
79	PENATA RUANG MUDA (PB)	0	1	1
80	Penera Ahli Pertama	0	2	2
81	Penera Pelaksana	1	1	2
82	PENGANTAR KERJA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS	0	1	1
83	Pengantar Kerja Pertama	0	2	2
84	PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PERBIBITAN DAN PRODUKSI PETERNAKAN	1	0	1
85	Pengawas Bibit Ternak Muda	1	0	1
86	Pengawas Bibit Ternak Pelaksana	1	1	2
87	Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan	1	0	1
88	Pengawas Bibit Ternak Pertama	0	1	1
89	PENGAWAS KEMETROLOGIAN MUDA (PB)	1	0	1

90	Pengawas Kemetrolgian Pertama	1	0	1
91	PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KELEMBAGAAN, PERIJINAN, KEANGGOTAAN DAN PENERAPAN PERAT	1	0	1
92	Pengawas Koperasi Ahli Pertama	1	0	1
93	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	1	0	1
94	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PRODUKSI PERKEBUNAN	1	0	1
95	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR SARANA PRASARANA DAN USAHA PETERNAKAN	1	0	1
96	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN MUDA (PB)	0	1	1
97	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	1	0	1
98	Pengawas Mutu Pakan Pelaksana	2	1	3
99	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (Pengawas Pemerintah) Madya	4	0	4
100	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (Pengawas Pemerintah) Muda	1	6	7
101	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (Pengawas Pemerintah) Pertama	0	1	1
102	Pengawas Perikanan Pelaksana	1	0	1
103	PENGELOLA KESEHATAN IKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KESEHATAN, LINGKUNGAN DAN KAWASAN BUDIDAYA	0	1	1
104	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama	0	1	1
105	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	1	2	3
106	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	3	0	3
107	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	6	0	6
108	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN	1	0	1
109	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MUDA (PB)	0	1	1
110	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN	0	1	1
111	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN SAMPAH	1	0	1
112	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN MUDA (PB)	0	1	1
113	PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN PELAKSANA/TERAMPIL	0	1	1
114	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama	0	1	1
115	PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	0	1	1
116	PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI	1	0	1
117	PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA	1	0	1

118	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	1	0	1
119	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MUDA (PB)	2	2	4
120	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana	2	0	2
121	PENYULUH PERINDUSTRIAN MUDA (PB)	2	0	2
122	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	16	8	24
123	Penyuluh Pertanian Madya	8	1	9
124	Penyuluh Pertanian Muda	7	4	11
125	PENYULUH PERTANIAN MUDA (PB)	0	2	2
126	Penyuluh Pertanian Pelaksana	0	2	2
127	Penyuluh Pertanian Pertama	3	9	12
128	PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL	20	6	26
129	PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KELEMBAGAAN, KEPAHLAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL	0	1	1
130	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	2	0	2
131	PENYULUH SOSIAL MUDA (PB)	1	0	1
132	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	0	1	1
133	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	1	0	1
134	PERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN WILAYAH	1	0	1
135	PERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENDANAAN	1	0	1
136	PERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PROGRAM	3	0	3
137	PERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PROGRAM DAN KEUANGAN	1	1	2
138	Perencana Muda	0	1	1
139	PERENCANA MUDA (PB)	9	6	15
140	Perencana Pertama	2	2	4
141	PERISALAH LEGISLATIF MUDA (PB)	1	0	1
142	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	2	0	2
143	Polisi Pamong Praja Terampil	5	1	6
144	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KOMUNIKASI PIMPINAN	1	0	1
145	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MUDA (PB)	1	1	2
146	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	0	1	1
147	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	0	2	2
148	PRANATA HUMAS AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KEHUMASAN DAN KEMITRAAN KOMUNITAS	1	0	1
149	PRANATA HUMAS AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	1	0	1
150	PRANATA HUMAS AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN OPINI DAN LAYANAN HUBUNGAN MEDIA	0	1	1
151	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA - SUB KOORDINATOR INFORMASI KEPEGAWAIAN	1	0	1
152	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	1	0	1

153	Pranata Komputer Pelaksana	1	1	2
154	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	4	5	9
155	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan BLUD	0	1	1
156	Pranata Komputer Pertama	3	3	6
157	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	1	3	4
158	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL BLUD	1	0	1
159	PUSTAKAWAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR LAYANAN, INFORMASI, OTOMASI DAN KERJASAMA	0	1	1
160	PUSTAKAWAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBINAAN PERPUSTAKAAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA GEMAR MEMBACA	0	1	1
161	Pustakawan Pelaksana	1	1	2
162	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	1	1	2
163	SANDIMAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KEAMANAN INFORMASI DAN PERSANDIAN	1	0	1
164	STATISTISI AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR STATISTIK SOSIAL, PEMERINTAHAN DAN BUDAYA	1	0	1
165	STATISTISI MUDA (PB)	0	1	1
166	Statistisi Pelaksana	0	1	1
167	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN	0	1	1
168	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	3	0	3
169	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN MUDA (PB)	1	0	1
170	Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana	3	2	5
171	TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE	1	0	1
172	TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI	1	0	1
173	Teknik Pengairan Ahli Pertama	1	0	1
174	Teknik Pengairan Pelaksana	2	0	2
175	TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGEMBANGAN KAWAS	1	0	1
176	Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana	1	1	2
177	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KUALITAS P	0	1	1
178	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERUMAHAN	0	1	1
179	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENATAAN INFRASTRUKTUR DAN SARANA PRAS	1	0	1
180	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PERTAMANAN DAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM	1	0	1
181	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	1	0	1
182	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN MUDA (PB)	0	2	2
183	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana	1	1	2

184	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama	1	2	3
	JUMLAH	238	189	427

Dari Tabel 2.9 diatas jumlah fungsional Lainnya terbanyak dari jabatan Penyuluh Pertanian (86 ASN) dari 427 ASN fungsional Lainnya.

TABEL 2.10 ASN FUNGSIONAL UMUM

Jabatan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	4	0	4
AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	0	1
AHLI PERTAMA - ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF	1	0	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	2	1	3
AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	0	1	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	1	0	1
AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	3	4
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	1	2	3
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	0	9	9
AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	1	1	2
AHLI PERTAMA - GURU IPA	1	9	10
AHLI PERTAMA - GURU KELAS	163	545	708
AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	1	9	10
AHLI PERTAMA - PAMONG BELAJAR	1	1	2
AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	0	1	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	0	2	2
AHLI PERTAMA - PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN	0	1	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	2	0	2
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	0	2	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	1	0	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	4	0	4
AHLI PERTAMA - PERAWAT	2	1	3
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	0	1	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	2	0	2
AHLI PERTAMA - SANITARIAN	0	1	1
AHLI PERTAMA - TEKNIK PENGAIRAN	1	0	1
AHLI PERTAMA - TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	2	0	2
AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	0	1	1
AHLI PERTAMA- GURU PENJASORKES	59	7	66
AHLI PERTAMA-GURU PPKN	3	1	4

AJUDAN	0	1	1
ANALIS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	1	0	1
ANALIS BANGUNAN DAN PERUMAHAN	0	1	1
ANALIS BENCANA	1	1	2
ANALIS DATA DAN INFORMASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3	1	4
ANALIS DIKLAT	0	1	1
ANALIS HUMAS	0	2	2
ANALIS IDEOLOGI	1	0	1
ANALIS IKLIM USAHA DAN KERJASAMA	1	0	1
ANALIS INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN	1	0	1
ANALIS JABATAN	0	1	1
ANALIS KEBIJAKAN BARANG MILIK NEGARA	1	0	1
ANALIS KELEMBAGAAN KURSUS DAN PELATIHAN	0	1	1
ANALIS KELUARGA BERENCANA	1	0	1
ANALIS KEMASYARAKATAN	0	1	1
ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	0	4
ANALIS KESEHATAN	2	1	3
ANALIS KESEJAHTERAAN KELUARGA	1	0	1
ANALIS KEUANGAN	0	2	2
ANALIS LAHAN PERTANIAN	1	0	1
ANALIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA	1	0	1
ANALIS LAYANAN UMUM	5	8	13
ANALIS MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	0	1	1
ANALIS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	1	1	2
ANALIS PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH	2	1	3
ANALIS PARIWISATA	0	1	1
ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	0	1	1
ANALIS PEMERINTAHAN DAERAH	1	0	1
ANALIS PENDAPATAN DAERAH	1	0	1
ANALIS PENDIDIKAN	2	0	2
ANALIS PENGAWASAN MASYARAKAT	2	0	2
ANALIS PENGELOLA DATA KOMODITAS PERKEBUNAN	0	1	1
ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI	1	0	1
ANALIS PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	2	0	2
ANALIS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA	1	0	1
ANALIS PENGEMBANGAN SISTEM OPERASI MEDIS (BLUD)	1	0	1
ANALIS PENGUSAHAAN DAN PELAYANAN	1	1	2
ANALIS PENINGKATAN USAHA PERTANIAN DAN AGROBISNIS	1	0	1
ANALIS PERBENDAHARAAN	1	0	1
ANALIS PEREKONOMIAN	1	1	2
ANALIS PERPUSTAKAAN	1	0	1
ANALIS PERTANAHAN	0	1	1
ANALIS PESERTA DIDIK	3	1	4
ANALIS POLITIK DALAM NEGERI	0	1	1

ANALIS PRASARANA PENDIDIKAN	2	0	2
ANALIS PRODUK HUKUM	1	3	4
ANALIS PROTOKOL	1	2	3
ANALIS SARANA PROGRAM KELUARGA BERENCANA	0	1	1
ANALIS TAMAN	1	0	1
Analisis Toponimi dan Data Wilayah	0	1	1
BENDAHARA	6	5	11
BIDAN TERAMPIL	0	6	6
BINATU RUMAH SAKIT	2	0	2
GURU	4	4	8
GURU BAHASA INDONESIA AHLI PERTAMA	1	1	2
GURU IPA AHLI PERTAMA	1	4	5
GURU KELAS AHLI PERTAMA	60	162	222
GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA	2	4	6
GURU PAI AHLI PERTAMA	3	6	9
GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA	23	22	45
GURU PENJAS AHLI PERTAMA	6	1	7
GURU PENJASORKES AHLI PERTAMA	2	0	2
GURU PPKN AHLI PERTAMA	1	1	2
GURU SENI BUDAYA AHLI PERTAMA	0	1	1
JURU PUNGUT RETRIBUSI	39	2	41
OPERATOR ALAT BERAT	1	0	1
OPERATOR MESIN	1	0	1
OPERATOR RADIO	1	1	2
OPERATOR TERMINAL	15	0	15
PEMELIHARA JALAN	12	0	12
PEMELIHARA PENERANGAN JALAN	1	0	1
PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN	11	0	11
PEMULA - PRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	1	0	1
PENELAHAH KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG / JASA	1	0	1
PENELAHAH PERKEMBANGAN BUMD	1	0	1
PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	0	1
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	0	1	1
PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1	0	1
PENGADMINISTRASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	2	0	2
PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN	1	1	2
PENGADMINISTRASI UMUM	273	83	356
PENGADMINISTRASI UMUM BLUD	8	5	13
PENGAWAS ANGKUTAN DAN TERMINAL	1	0	1
PENGAWAS MUTU BIBIT TERNAK	1	0	1
PENGAWAS SATUAN PELAYANAN	1	0	1
PENGELOLA ADAT DAN KESENIAN	2	0	2
PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	2	1	3
PENGELOLA BARANG	1	0	1
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	4	4	8

PENGELOLA BENGKEL	2	0	2
PENGELOLA DATA	9	7	16
PENGELOLA DATA BASE	2	0	2
PENGELOLA DATA JARINGAN TRANSPORTASI JALAN	2	0	2
PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	3	0	3
PENGELOLA DATA PELAYANAN	1	1	2
PENGELOLA DATA PELAYANAN PERPAJAKAN	1	0	1
PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	3	4	7
PENGELOLA DATABASE PENDIDIKAN	0	1	1
PENGELOLA GAJI	0	1	1
PENGELOLA KEPEGAWAIAN	1	1	2
PENGELOLA KEPERAWATAN	1	0	1
PENGELOLA KEUANGAN	50	49	99
PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DESA	0	1	1
PENGELOLA LABORATORIUM	1	2	3
PENGELOLA OBAT DAN ALAT -ALAT KESEHATAN	0	3	3
PENGELOLA PASAR	1	0	1
PENGELOLA PBB P2 DAN BPHTB	1	0	1
PENGELOLA PELAYANAN KESEHATAN	1	4	5
PENGELOLA PENAGIHAN DAN PENGAWASAN	0	1	1
PENGELOLA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK/ RETRIBUSI	2	0	2
PENGELOLA PENDAPATAN	3	0	3
PENGELOLA PENERANGAN JALAN	1	0	1
PENGELOLA PENYAKIT TIDAK MENULAR	1	2	3
PENGELOLA PERBENGKELAN DAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	0	1	1
PENGELOLA PERPUSTAKAAN	2	8	10
PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	1	2	3
PENGELOLA PROMOSI DAN INFORMASI WISATA	0	1	1
PENGELOLA RUMAH POTONG HEWAN	1	0	1
PENGELOLA SIM PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	0	1	1
PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN	1	0	1
PENGEMUDI	11	0	11
PENGEMUDI AMBULANCE	4	0	4
PENGOLAH DATA KONSOLIDASI REKENING PEMERINTAH	1	0	1
PENGOLAH DATA PERBENDAHARAAN	1	0	1
PENJAGA PINTU AIR	6	0	6
PENYULUH KEPEMUDAAN	1	0	1
PENYULUH KOPERASI	0	1	1
PENYULUH PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN ANAK	0	1	1
PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	0	3	3
PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL	2	0	2
PENYULUH WISATA	1	0	1

PENYUSUN BAHAN BANTUAN HUKUM	0	1	1
PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	7	5	12
PENYUSUN PROGRAM PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	1	0	1
PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	1	0	1
PENYUSUN RENCANA PENGENDALIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	1	0	1
PETUGAS KEAMANAN	4	0	4
PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	12	0	12
PETUGAS SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI DARAT	0	1	1
PRAMU BAKTI	99	6	105
PRAMU KANTOR	1	0	1
PRAMU KEBERSIHAN	42	2	44
PRAMU TAMAN DAN PEMELIHARAAN	0	1	1
PRANATA KEARSIPAN	0	1	1
PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	0	1
PRANATA LAPORAN KEUANGAN	1	0	1
PRANATA PEMADAM KEBAKARAN	1	0	1
PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	0	1
PRANATA TATA PRAJA	1	1	2
TEKNISI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA	6	0	6
TENAGA GURU	0	4	4
TERAMPIL - BIDAN	0	6	6
TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	1	2
TERAMPIL - PERAWAT	5	8	13
TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	1	0	1
TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	0	2	2
VERIFIKATOR KEUANGAN	1	1	2
jumlah	1103	1088	2191

Dari Tabel 2.10 diatas jumlah fungsional Umum terbanyak dari jabatan Guru Kelas (933 ASN) dari 2.191 ASN fungsional umum.

TABEL 2.11 ASN BERDASARKAN GOLONGAN PER-OPD

No	Unit Organisasi / OPD	I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	Jumlah (orang)
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0	0	0	0	0	1	3	3	4	3	2	9	1	1	0	0	0	27
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0	0	0	0	0	1	0	5	2	1	7	1	0	1	0	0	18
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	0	0	0	1	0	2	1	2	14	19	8	9	10	1	1	0	0	68
4	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1	7	7	3	0	1	0	0	25
5	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	0	0	0	1	6	1	11	5	13	4	2	6	8	1	1	0	0	59
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	0	0	0	0	0	18	2	8	6	0	3	1	0	0	0	0	38
7	DINAS KESEHATAN	0	0	0	1	0	5	71	20	219	122	149	159	16	29	20	0	0	811
8	DINAS KETENAGA KERJAAN	0	0	0	0	0	0	1	0	8	1	0	6	2	0	1	0	0	19
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	0	0	0	0	1	2	1	8	4	1	8	3	1	0	0	0	29
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	15	3	2	6	3	6	4	1	7	4	0	1	0	0	52
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0	0	0	1	20	0	10	2	37	17	7	20	6	7	1	0	0	128
12	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0	0	0	2	0	0	3	5	6	1	2	7	3	1	1	0	0	31
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	0	0	11	11	7	25	16	24	16	5	8	4	1	1	0	0	129
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	3	6	2	1	1	0	0	22
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	0	0	0	1	0	0	2	4	4	1	5	5	1	1	0	0	24
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	0	0	0	0	1	1	0	4	2	4	3	4	0	1	0	0	20
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	0	4	3	10	19	64	73	1635	420	387	470	552	243	11	0	0	3891
18	DINAS PERHUBUNGAN	0	0	0	3	0	1	8	8	12	5	0	4	1	1	1	0	0	44
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	0	0	1	9	2	7	7	12	9	7	5	6	1	0	0	0	0	66

20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	0	0	0	0	1	1	1	8	8	3	7	1	1	1	0	0	32
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	0	0	0	0	1	4	3	9	2	1	9	2	1	1	0	0	33
22	DINAS SOSIAL	0	0	0	0	0	0	3	3	4	1	2	4	2	1	0	0	0	20
23	INSPEKTORAT DAERAH	0	0	0	0	1	0	1	0	7	2	5	13	7	3	3	0	0	42
24	KECAMATAN BANDAR	0	0	0	0	0	1	3	2	4	2	3	1	1	0	0	0	0	17
25	KECAMATAN BANYUPUTIH	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	2	1	1	0	0	0	11
26	KECAMATAN BATANG	0	0	0	0	0	3	4	5	9	28	7	10	3	0	0	0	0	69
27	KECAMATAN BAWANG	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	1	1	1	1	0	0	0	12
28	KECAMATAN BLADO	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3	2	0	0	0	0	0	8
29	KECAMATAN GRINGSING	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	2	1	0	0	0	0	9
30	KECAMATAN KANDEMAN	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	1	0	0	1	0	0	0	9
31	KECAMATAN LIMPUNG	0	0	0	1	0	0	0	2	1	2	1	2	0	1	0	0	0	10
32	KECAMATAN PECALUNGAN	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	2	1	1	0	0	0	9
33	KECAMATAN REBAN	0	0	0	0	0	0	1	6	2	3	2	2	1	0	0	0	0	17
34	KECAMATAN SUBAH	0	0	0	0	0	1	1	2	1	3	2	1	0	0	0	0	0	11
35	KECAMATAN TERSONO	0	0	0	0	1	0	0	3	0	2	1	3	1	0	0	0	0	11
36	KECAMATAN TULIS	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	0	3	1	1	0	0	0	12
37	KECAMATAN WARUNGASEM	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	2	0	1	1	0	0	0	11
38	KECAMATAN WONOTUNGGAL	0	0	0	0	0	1	2	1	1	3	1	3	0	1	0	0	0	13
39	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	0	0	0	2	0	2	2	4	4	4	2	4	1	1	0	0	26
40	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. BATANG	0	0	1	1	0	3	28	5	27	60	43	95	38	25	5	0	0	331
41	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG	0	0	0	0	0	0	39	1	14	18	14	12	4	1	0	0	0	103
42	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	0	0	2	12	1	9	7	7	4	5	3	4	1	0	0	0	55
43	SEKRETARIAT DAERAH	0	0	0	1	0	2	7	5	28	19	7	11	6	7	6	0	0	99
44	SEKRETARIAT DPRD	0	0	0	1	0	1	1	4	2	5	5	3	3	1	1	0	0	27
	Jumlah	0	0	6	53	69	63	344	220	2163	825	702	943	710	338	62	0	0	6498

